

BAB III PEMBAHASAN

Negara wajib menjamin setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) Pendanaan pemerintah untuk sektor pendidikan merupakan hal yang mendorong kegiatan pembelajaran. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berdasarkan UU No 20 yang menjelaskan 20% anggaran untuk sektor pendidikan dalam APBN bahkan APBD.

Demikian warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Banyaknya daerah di Jawa Barat yang belum mencapai wajib belajar selama sembilan tahun menjadikan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan tidak berjalan optimal.

- Penelitian terdahulu menjelaskan peranan pengeluaran pendidikan untuk meningkatkan capaian pendidikan oleh Obi, dkk (2016), Bado dan Hasbiah (2017), bahwa terdapat pengaruh positif antara pengeluaran pendidikan dan capaian pendidikan. Namun kondisi pengeluaran sektor pendidikan belum dikatakan mampu dalam meningkatkan capaian pendidikan di Jawa Barat.

Kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting dan menjadi salah satu input pembangunan maka perlunya mencapai program pemerintah melalui target wajib belajar sembilan tahun Di Indonesia, bentuk pendanaan yang diberikan berupa Dana Bos. Menurut Maya (2017) program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program nasional pemerintah dalam bidang pendidikan yang dirancang untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan di satuan pendidikan tingkat dasar.

Alokasi dana BOS yang besar membutuhkan pengelolaan dan pertanggungjawaban yang transparan dari pihak sekolah. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan dana bos sesuai dengan petunjuk penggunaan teknis yang telah diatur oleh kementerian pendidikan. Penulis melakukan wawancara terhadap tiga pihak, yaitu kepala sekolah, orang tua murid, dan murid.

Kebijakan akuntansi di pemerintah desa berdasar kepada Permendagri nomor 64 tahun 2013, kebijakan ini dikelompokkan menjadi dua hal yaitu yang berkaitan dengan kebijakan dalam pelaporan keuangan dan yang ke dua berkaitan dengan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur

tentang penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam meningkatkan laporan keuangan menjadi lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tetnang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang biasa digunakan oleh entitas pemerintah adalah basis kas menuju akrual. Pada basis ini, aset, kewajiban, dan ekuitas dana dicatat dengan menggunakan metode yang berbasis akrual. Konsekuensi dari pengguna metode ini adalah dibutuhkannya penggunaan jurnal tambahan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pengeluaran pemerintah sektor pendidikan diseluruh kabupaten kota Provinsi Jawa Barat merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pem-biayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. mengenai kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang kegiatan pendidikan. Mulai dari penggantian dan/atau penambahan meja, kursi, papan tulis, dan alat-alat tulis, bahkan sampai kebutuhan mengenai fasilitas penunjang bagi tenaga pendidik, seperti seragam dan upah untuk tenaga pendidik.

Pada tahun 2018-2019 Daerah Jawa Barat mendapatkan anggaran untuk kebutuhan pendidikan. Berikut data realisasi belanja tahun 2018-2019 Kabupaten/Kota Jawa Barat:

Tabel 3.1 Data Realisasi Belanja Tahun 2018

No.	Nama Pemda	Fungsi Pendidikan
1	Provinsi Jawa Barat	7,979,213.93
2	Kab. Bandung	2,007,155.96
3	Kab. Bekasi	1,622,496.15
4	Kab. Bogor	2,273,954.86
5	Kab. Ciamis	963,078.27
6	Kab. Cianjur	1,354,169.99
7	Kab. Cirebon	1,363,307.60
8	Kab. Garut	1,731,783.63
9	Kab. Indramayu	1,050,379.41
10	Kab. Karawang	1,244,800.12
11	Kab. Kuningan	993,340.30
12	Kab. Majalengka	1,243,283.99
13	Kab. Purwakarta	730,752.93

14	Kab. Subang	1,114,292.05
15	Kab. Sukabumi	1,209,225.97
16	Kab. Sumedang	985,729.06
17	Kab. Tasikmalaya	1,309,223.40
18	Kota Bandung	1,343,720.50
19	Kota Bekasi	1,536,694.10
20	Kota Bogor	560,715.77
21	Kota Cirebon	368,080.40
22	Kota Depok	842,625.20
23	Kota Sukabumi	255,943.68
24	Kota Tasikmalaya	539,908.96
25	Kota Cimahi	361,161.23
26	Kota Banjar	152,619.44
27	Kab. Bandung Barat	997,025.52
28	Kab. Pangandaran	377,910.54

Tabel 3.2 Data Realisasi Belanja Tahun 2019

No.	Nama Pemda	Fungsi Pendidikan
1	Provinsi Jawa Barat	13,429,466.75
2	Kab. Bandung	1,977,157.09
3	Kab. Bekasi	1,599,586.95
4	Kab. Bogor	2,448,911.58
5	Kab. Ciamis	983,199.00
6	Kab. Cianjur	1,429,325.51
7	Kab. Cirebon	1,324,323.40
8	Kab. Garut	1,593,929.06
9	Kab. Indramayu	1,002,272.54
10	Kab. Karawang	1,271,545.26
11	Kab. Kuningan	1,004,504.47
12	Kab. Majalengka	1,259,036.91
13	Kab. Purwakarta	694,099.49
14	Kab. Subang	947,047.00
15	Kab. Sukabumi	1,236,523.91
16	Kab. Sumedang	1,119,206.82

17	Kab. Tasikmalaya	1,454,047.42
18	Kota Bandung	1,617,464.12
19	Kota Bekasi	1,503,260.87
20	Kota Bogor	604,313.48
21	Kota Cirebon	348,259.88
22	Kota Depok	863,380.45
23	Kota Sukabumi	290,841.04
24	Kota Tasikmalaya	536,493.08
25	Kota Cimahi	381,888.54
26	Kota Banjar	177,062.66
27	Kab. Bandung Barat	314,868.32
28	Kab. Pangandaran	370,969.68

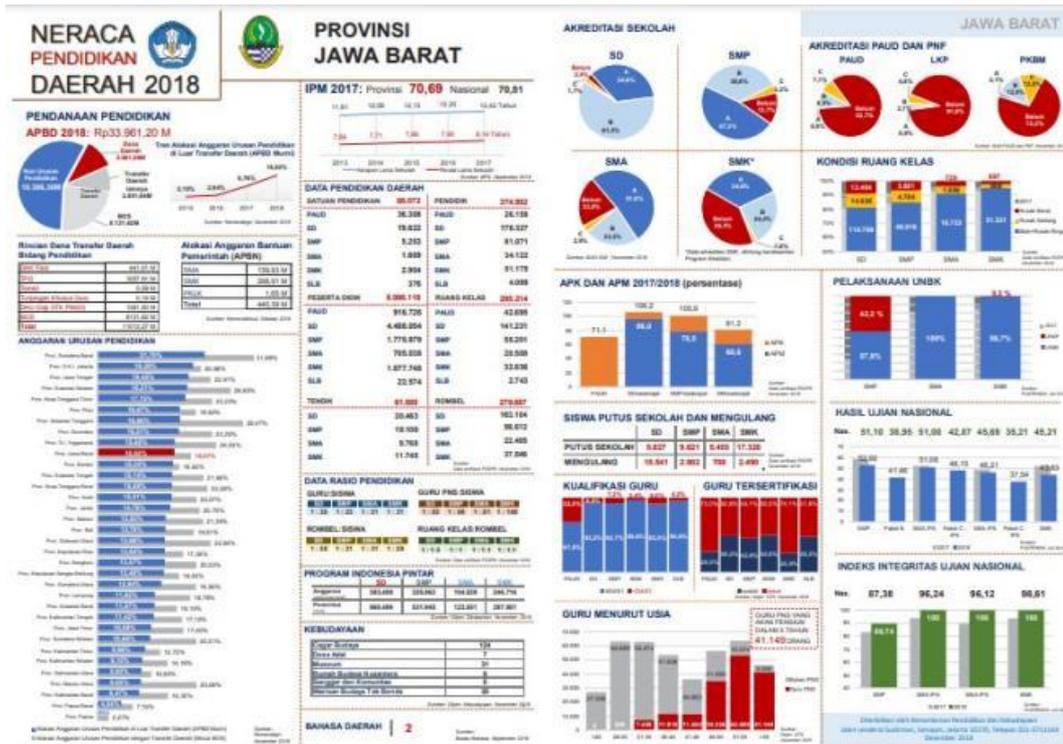
Tabel 3.3 Data Jumlah Selisih dan Persentase LRA 2018-2019

No.	Nama Pemda	Selisih	Persentase
1	Provinsi Jawa Barat	5,450,252.82	68.30563592
2	Kab. Bandung	-29,998.88	-1.494596297
3	Kab. Bekasi	-22,909.20	-1.411972779
4	Kab. Bogor	174,956.72	7.693939724
5	Kab. Ciamis	20,120.73	2.089209922
6	Kab. Cianjur	75,155.52	5.549932809
7	Kab. Cirebon	-38,984.20	-2.859530906
8	Kab. Garut	-137,854.57	-7.960265114
9	Kab. Indramayu	-48,106.88	-4.579952197
10	Kab. Karawang	26,745.14	2.148549044
11	Kab. Kuningan	11,164.17	1.12390189
12	Kab. Majalengka	15,752.92	1.26704122
13	Kab. Purwakarta	-36,653.43	-5.015844863
14	Kab. Subang	-167,245.05	-15.00908586
15	Kab. Sukabumi	27,297.94	2.257472175
16	Kab. Sumedang	133,477.75	13.54101818
17	Kab. Tasikmalaya	144,824.02	11.06182605
18	Kota Bandung	273,743.61	20.37206477
19	Kota Bekasi	-33,433.23	-2.17565945

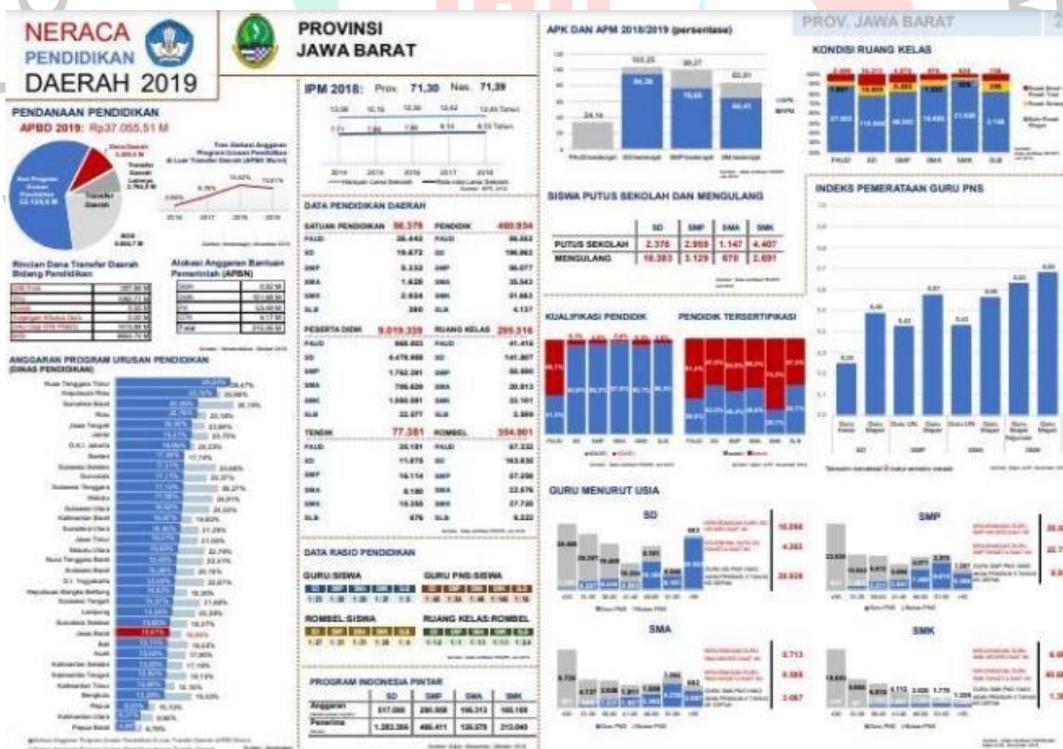
20	Kota Bogor	43,597.71	7.775368065
21	Kota Cirebon	-19,820.51	-5.384832847
22	Kota Depok	20,755.25	2.463164769
23	Kota Sukabumi	34,897.36	13.63478236
24	Kota Tasikmalaya	-3,415.88	-0.632676664
25	Kota Cimahi	20,727.31	5.739073518
26	Kota Banjar	24,443.22	16.0157967
27	Kab. Bandung Barat	-682,157.20	-68.41923173
28	Kab. Pangandaran	-6,940.86	-1.836640246

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang meng-undang perhatian publik atau masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada ke-pentingan publik.

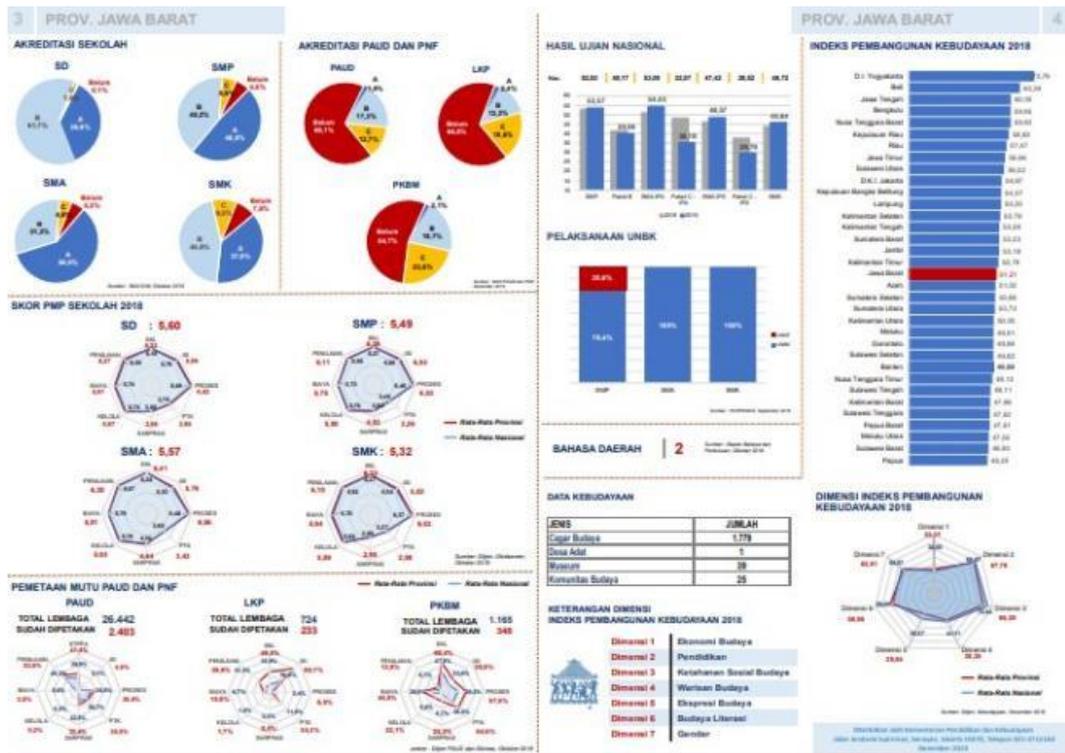
Efisiensi dan efektivitas penting dan sangat diperlukan dalam merealisasikan anggaran dinas. Dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang baik, maka program – program pemerintah dijalankan sesuai budget awal. Efisiensi dan efektivitas merupakan isu yang umum bagi instansi pemerintah. Banyak instansi pemerintah yang berusaha untuk mencapai kriteria efektif dan efisien dalam penyerapan anggaran. Namun untuk mencapai kriteria tersebut bukan hal yang mudah. Isntansi pemerintah harus me-realisasikan budget yang telah ditetapkan. Apabila budget tidak terserap dengan baik, maka kriteria efektif dan efisien tidak akan tercapai.



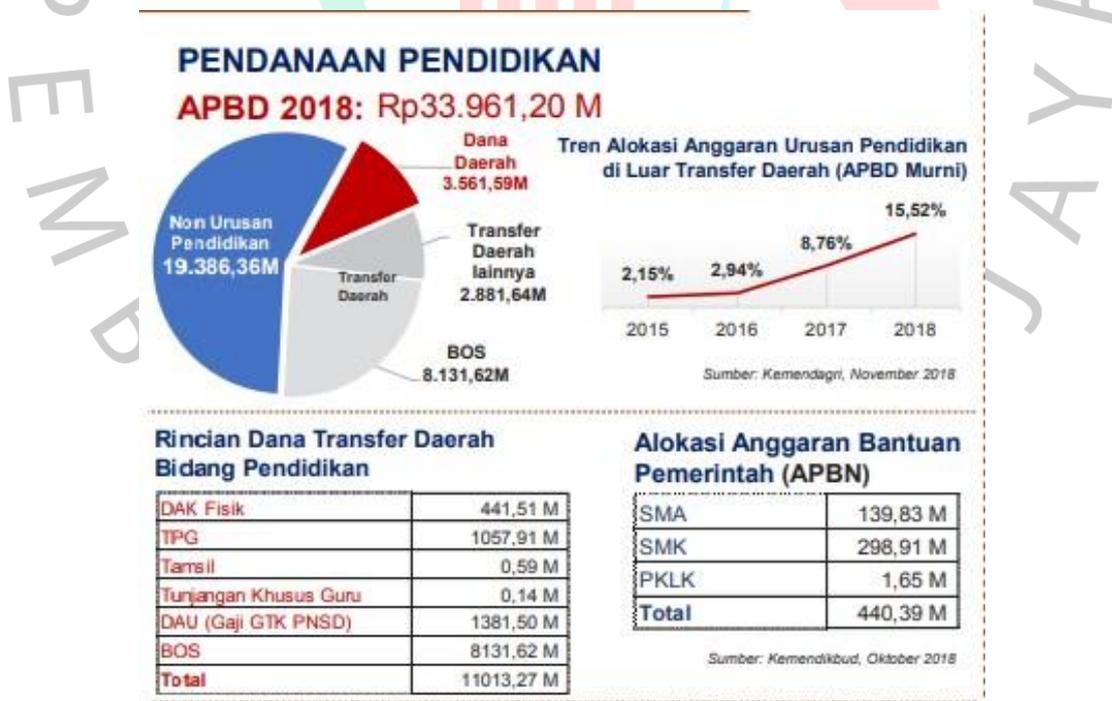
Gambar 3.1 Neraca Pendidikan Daerah 2018 Jawa Barat



Gambar 3.2 Neraca Pendidikan Daerah 2019 Jawa Barat



Gambar 3.3 Neraca Pendidikan Daerah 2019 Jawa Barat Bagian 2



Gambar 3.4 Anggaran Pendidikan Daerah 2018 Jawa Barat

PENDANAAN PENDIDIKAN

APBD 2019: Rp37.055,51 M



Rincian Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan

DAK Fisik	297,89 M
TPG	1082,71 M
Tamsil	0,00 M
Tunjangan Khusus Guru	0,00 M
DAU (Gaji GTK PNSD)	1413,88 M
BOS	8654,75 M

Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah (APBN)

SMA	0,92 M
SMK	151,88 M
PK	53,49 M
GTK	4,17 M
Total	210,46 M

Sumber: Kemendikbud, Oktober 2019

Gambar 3.5 Anggaran Pendidikan Daerah 2019 Jawa Barat

Jika dilihat dari perbandingan perhitungan tersebut, dihasilkan jumlah:

1. Pada Tahun 2018: Rp. 33.961,20 M (Zimmerman et al., 2018).
2. Pada Tahun 2019: Rp.37.005,51 M (Barat, 2019).

Kenaikan yang dialami sebesar Rp.3.044,31 M